

**ANALISIS PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT
KEJAHATAN PENCURIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2010-2015**

**ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC EFFECT ON CRIMES RATE OF THEFT
IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN 2010-2015**

Yogie Yedia Priatna
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Email Penulis : yediapriatna@gmail.com

INTISARI

Kejahatan pencurian merupakan perilaku menyimpang dengan mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut. Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi terutama pada kasus tindak kejahatan pencurian.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sosial-ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan rasio gini terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diambil menurut kabupaten/kota seluruh wilayah DIY.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data panel dengan model *fixed effect model* (FEM). Hasil dari analisis model data panel menunjukkan bahwa variabel independen tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel tingkat pendidikan dan rasio gini keduanya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2015.

Kata kunci : Tingkat pencurian (PNC), tingkat pendidikan (PND), tingkat pengangguran (PNG) dan rasio gini (GINI)

ABSTRACT

Theft crime is deviant behavior by taking a product wholly or partially belongs to another person with the intention of having the goods. The criminal act of theft is divided into several types, namely the crime of theft with violence, theft by weighting, ordinary theft and motor vehicle theft. Special Region of Yogyakarta is a region with relatively high crime rate, especially in the case of a crime of theft.

The purpose of this study was to analyze the influence of socio-economics is the level of education, unemployment and the Gini ratio to the level of the crime of theft in Yogyakarta period 2010-2015. The data used in this research is secondary data in the form of panel data that is retrieved by regencies/cities throughout the DIY area.

Methods of data analysis which used in this study is panel data analysis model with fixed effect model (FEM). The results of the panel data model analysis showed that the independent variables unemployment rate is not significantly and negatively. While the variable education rate and gini ratio are both negative and significant effect on the theft rate in the Special Region of Yogyakarta period 2010-2015.

Keywords: *theft rate (PNC), education level (PND), unemployment rate (PNG) and the Gini ratio (GINI)*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia berbeda-beda, tak terbatas dan selalu berubah-ubah serta cenderung bertambah setiap waktu. Sehingga mendorong setiap individu untuk berusaha dengan keras agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, hal itu karena terbatasnya kemampuan dan ketatnya persaingan.

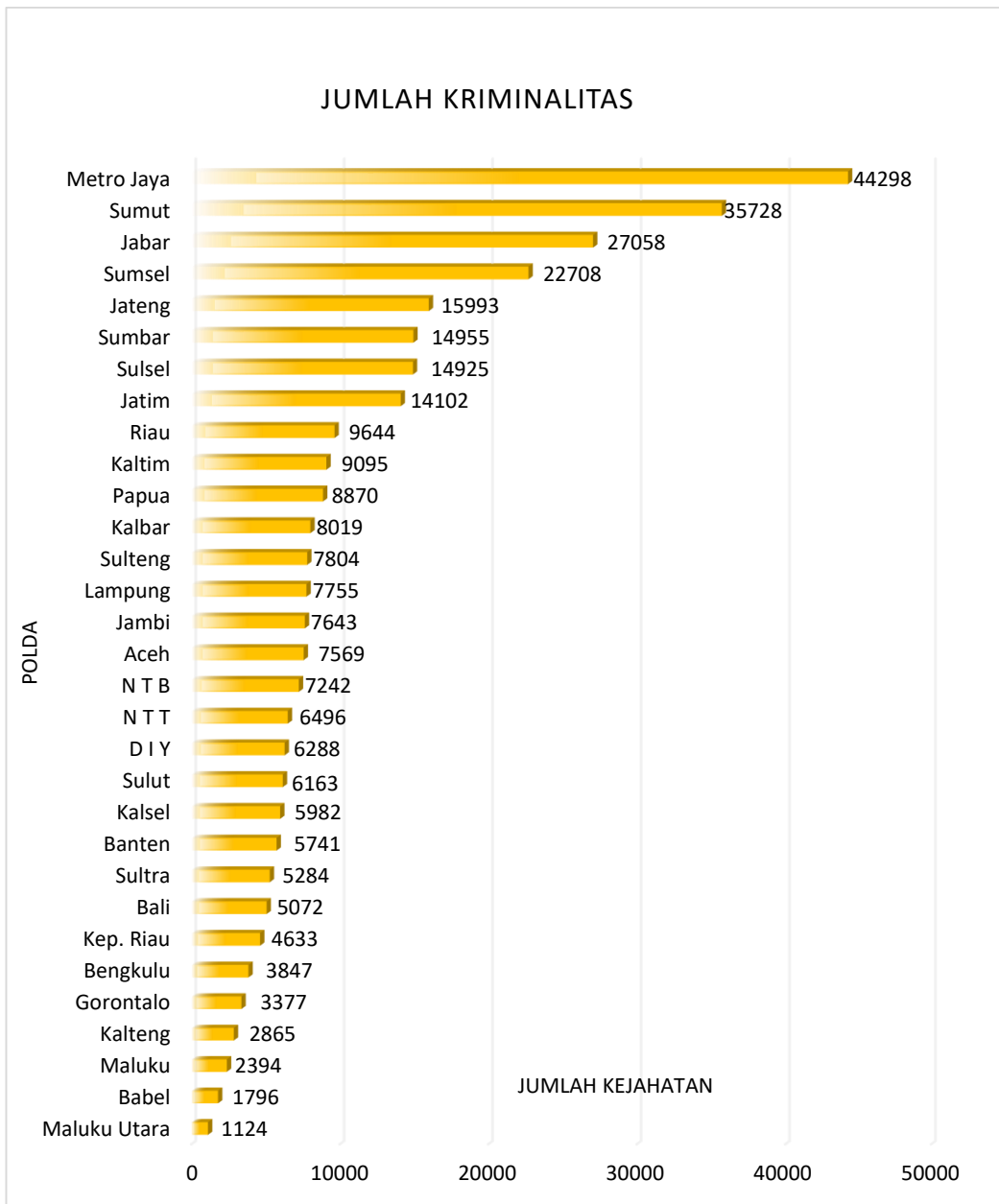
Menurut Kartono dalam Arsono (2014) di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju dengan pesat sehingga menimbulkan semakin pesatnya persaingan yang ada. Globalisasi berdampak pada semakin mudahnya seseorang masuk dan keluar ke dalam suatu daerah berimplikasi pada masuknya budaya-budaya asing ke dalam negeri. Besarnya pengaruh invasi budaya yang masuk membawa beberapa nilai-nilai baru sedikitnya mempengaruhi nilai-nilai yang telah berlaku di masyarakat. Nilai-nilai baru yang masuk membawa beberapa perubahan terhadap perilaku masyarakat. Tak terkecuali nilai-nilai negatif yang datang menyebabkan keresahan dalam masyarakat seperti hedonism dan matrealisme. Keinginan pemenuhan kebutuhan yang melimpah seseorang jika tidak diiringi dengan kemampuan atau *skill* yang baik maka akan sulit untuk mencapai kebutuhan materi yang diinginkan sehingga memaksa seseorang untuk mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak wajar yang termasuk dalam sebuah tindak kejahatan.

Kriminalitas atau kejahatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kriminalitas kian berkembang baik dari segi jumlah atau bentuknya, terutama terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Daerah perkotaan merupakan pusat terjadinya tindak kriminal hal ini terjadi karena di daerah perkotaan terjadi persaingan yang ketat karena daerah perkotaan menjadi pusat kegiatan perkonomian di suatu wilayah sehingga setiap orang dituntut untuk dapat bersaing dengan keras sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, daerah perkotaan juga merupakan tujuan para pencari kerja yang datang dari daerah pedesaan. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan daerah perkotaan menjadi wilayah padat penduduk. Semakin padat suatu daerah maka akan menimbulkan tingginya bentuk persaingan antar individu maupun kelompok, hal itu akan semakin memicu terjadinya tindak kejahatan.

Selama periode tahun 2011–2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Catatan di Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.084 kasus. Pada tahun 2014 kasus kriminalitas menurun menjadi 325.317 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 134 orang pada tahun 2012, 140 orang pada tahun 2013 dan 131 orang pada tahun 2014. (BPS, 2015)

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah kejahatan untuk provinsi/polda selama tahun 2014 terlihat bahwa Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak yaitu 44.298 kasus, kemudian diurutkan kedua adalah Polda Sumatera Utara sebanyak 35.728 kasus, dan Jawa Barat 27.058 kasus. Sedangkan Polda Maluku, Kep. Bangka Belitung, dan Maluku Utara jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 2.394, 1.796, dan 1.124, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit. Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah.

Gambar 1. 1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriminalitas yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali diakibatkan oleh kepadatan penduduk akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah karena tingginya arus urbanisasi, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, tingkat pendidikan yang rendah, ketimpangan pendapatan, banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Baik secara nasional maupun daerah, kriminalitas yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia disebabkan oleh hal yang sama, begitu juga dengan tingkat kriminalitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Gambar 1.1 ditunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta ada sejumlah 6.288 kasus kejahatan atau kriminalitas selama periode tahun 2014. Jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, jumlah kriminalitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebanyak 6.873 kasus, tahun 2014 sebanyak 6.288 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 7195 kasus. (BPS, 2016)

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2013-2015

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2013	2014	2015	
1	Pencurian dengan pemberatan	872	741	759	2372
2	Pencurian kendaraan bermotor	743	608	562	1913
3	Pencurian dengan kekerasan	174	212	234	620
4	Pencurian ringan-biasa	671	622	770	2063
5	Penganiayaan ringan	398	451	470	1319
6	Penganiayaan berat	44	48	56	148
7	Pembunuhan	12	10	8	30
8	Perkosaan	21	21	23	65
9	Kenakalan remaja	12	20	13	45
10	Mata uang palsu	3	1	2	6
11	Narkotika	336	389	426	1151
12	Perjudian	137	87	135	359
13	Pemerasan-ancaman	57	47	76	180
14	Penculikan	4	7	16	27
15	Penipuan-curang	1403	1296	1698	4397
16	Penadahan	4	1	3	8
17	Pengrusakan	127	110	114	351
18	Penggelapan	539	565	652	1756
19	Aksi mogok	0	0	0	0
20	Kejahatan lainnya	1316	1052	1178	3546
Jumlah		6873	6288	7195	

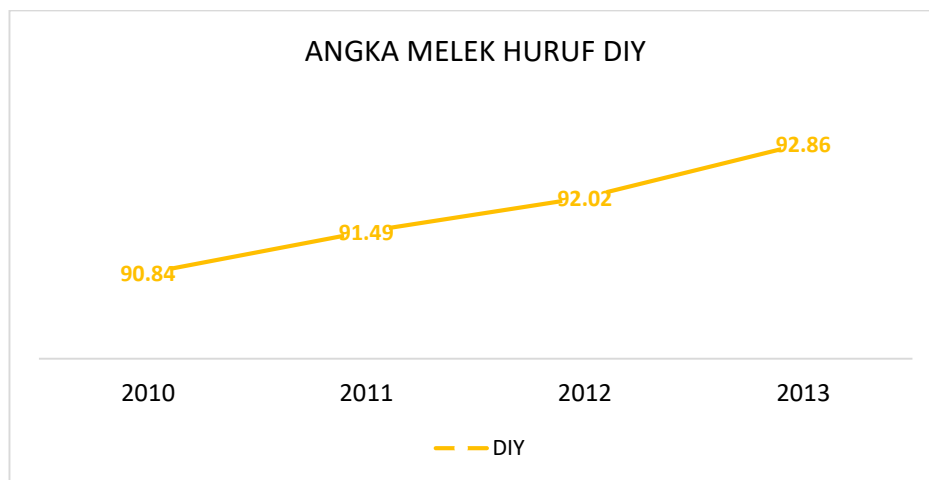
Sumber : BPS Provinsi DIY

Berdasarkan Tabel 1.1, Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga periode yaitu tahun 2013-2015, jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013

yaitu sebesar 6.873 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan jumlah 6.288 kasus, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup banyak yaitu 7.195 kasus yang dilaporkan pada Polda DIY. Tabel 1.1 juga menunjukkan jumlah kejahatan berdasarkan jenis kejahatan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 20 jenis kejahatan yang ada terlihat bahwa kejahatan pencurian secara keseluruhan baik itu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ringan atau biasa dari tiga tahun terakhir selalu lebih tinggi dari jenis kejahatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dijumlahkan maka tingkat kejahatan pencurian di DIY selama periode tahun 2013-2015 mencapai 6.968 kasus pencurian. D.I. Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak menjadi suatu jaminan bahwa kejahatan yang terjadi akan rendah terutama terkait dengan kejahatan pencurian yang selalu tinggi dibandingkan jenis kejahatan lain dimana pencurian merupakan indikasi bahwa adanya kebutuhan ekonomi seseorang yang tidak dapat ia penuhi sehingga memaksanya menempuh jalan yang tidak wajar untuk memenuhinya.

Meningkatnya tindak kejahatan pencurian dari tahun ke tahun seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Sullivan (2007) cara yang dapat digunakan untuk menekan angka kejahatan adalah dengan hukuman atau dengan meningkatkan upah pendapatan. Salah satu cara untuk meningkatkan upah pendapatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya.

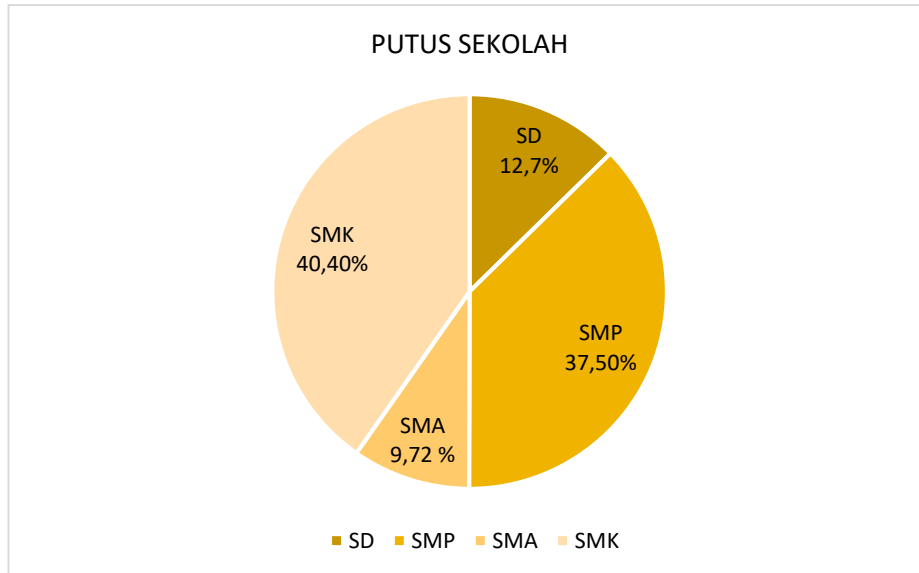
Gambar 1. 2 Angka Melek Huruf Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi DIY

Kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, AMH Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 92,86 persen, artinya 92,86 persen proporsi penduduk 15 tahun ke atas telah bisa dan mengerti baca-tulis. Selain itu angka melek huruf juga dipengaruhi oleh banyaknya murid yang putus sekolah di suatu daerah terutama pada jenjang sekolah dasar.

Gambar 1. 3 *Persentase Murid Putus Sekolah menurut Jenjang Sekolah di D.I. Yogyakarta, 2015*



Sumber : BPS Provinsi DIY

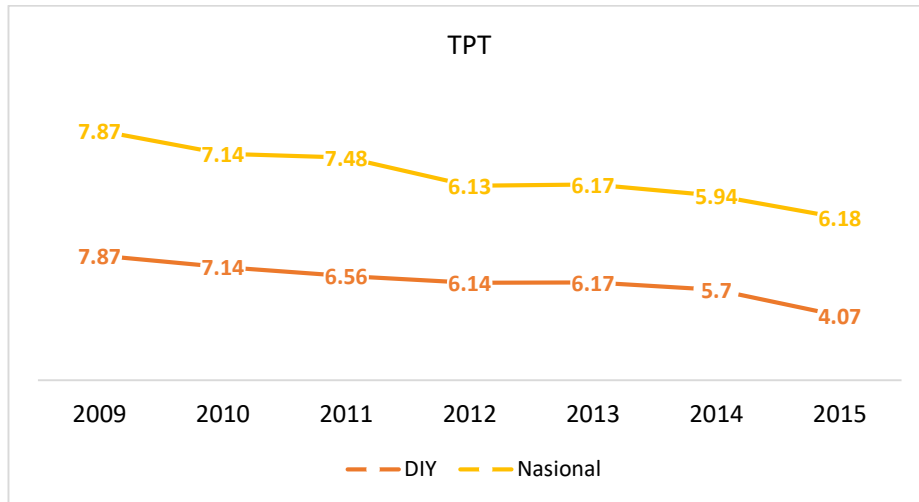
Persentase murid putus sekolah di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 paling tinggi terjadi pada jenjang SMK, kemudian disusul pada tingkat SMP, lalu SMA kemudian paling kecil yaitu pada tingkat Sekolah Dasar. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 dari total 792 murid putus sekolah paling tinggi disumbang oleh Kulon Progo yaitu dengan jumlah 240 murid, kemudian Kota Yogyakarta dengan 190 murid, Gunungkidul dengan 136 murid, Bantul dengan 121 murid dan paling sedikit yaitu dari Sleman dengan 105 murid putus sekolah. Pada tahun sebelumnya jumlah murid putus sekolah lebih tinggi yaitu 887 murid. Semakin banyak angka putus sekolah mengakibatkan semakin banyak pula penduduk dengan pendidikan rendah. Semakin rendah pendidikan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia semakin rendah pula. Penduduk dengan pendidikan rendah cenderung memiliki waktu luang lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk pendidikan tinggi. Menurut Lochner (2007) banyaknya waktu luang yang ada dapat memberikan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal.

Keterbatasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimiliki. Sehingga sulit bagi mereka yang berpendidikan rendah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan layak. Dengan alasan itu maka seseorang akan bertindak dengan segala cara untuk mendapatkan dambaan pemuas kebutuhan. Di tengah globalisasi yang dipenuhi oleh gaya hidup matrealistis dan hedon maka bukan tidak mungkin seseorang akan melakukan hal ilegal atau tidak wajar untuk mendapatkan uang, yaitu salah satunya dengan cara mencuri.

Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Menurut Wong dalam Hardianto (2009) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa tingkat pengangguran mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat kriminalitas suatu wilayah. Tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) wilayah tersebut. Selama periode

tahun 2009-2015 tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam Gambar 1.4.

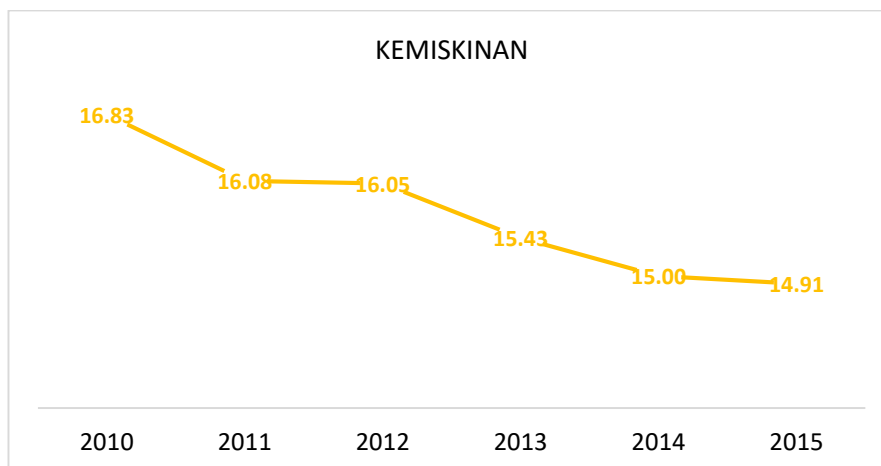
Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Nasional, 2009-2015



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan dengan TPT nasional, TPT Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif lebih rendah. Menurunnya tingkat pengangguran seharusnya dapat menurunkan tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015 kejahatan pencurian mengalami fluktuasi. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan seseorang rendah. Pendapatan yang rendah secara berkelanjutan akan menyebabkan kemiskinan. Miskin berarti memiliki pendapatan yang lebih kecil dari pendapan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak atau kemampuan pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.

Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta, 2010-2015

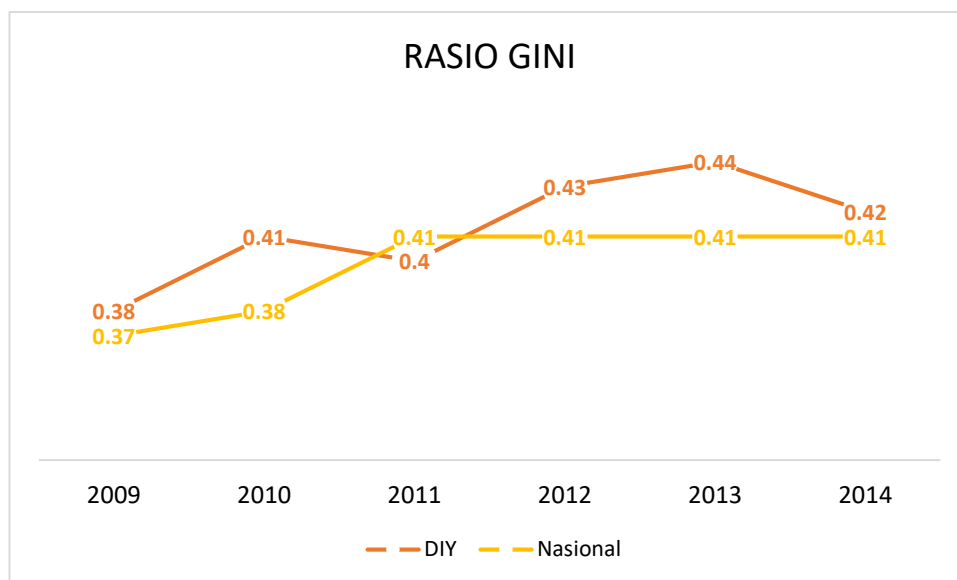


Sumber : BPS Provinsi DIY

Persentasi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami penurunan. Penurunan penduduk miskin sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran. BPS Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pada 2015 garis kemiskinan sebesar Rp. 335.886 perkapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 550,23 ribu orang. Kemiskinan seringkali menumpuk di daerah perkotaan, di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk miskin tersebar di daerah perkotaan sejumlah 329,65 ribu dan di daerah pedesaan sebesar 220,57 ribu orang. Besarnya jumlah penduduk miskin di perkotaan mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk sering diukur dengan menggunakan indikator Rasio Gini.

Gambar 1. 6 Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional, 2009-2014



Sumber : BPS Provinsi DIY

Dari Gambar 1.6 Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta berfluktuasi. Ketimpangan paling tinggi antara tahun 2009-2015 terjadi pada tahun 2013 dengan rasio 0.44 namun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang. Secara umum dibandingkan dengan Rasio Gini nasional, Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif lebih tinggi. Artinya ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi daripada ketimpangan yang dihitung secara nasional. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial tersebut apabila diikuti dengan sulitnya mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan secara layak akan memicu penyimpangan perilaku yaitu melakukan hal yang tak wajar untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan, salah satunya yaitu tindak pencurian.

Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai kota pendidikan atau kota pelajar. Dengan tingkat pendidikan yang baik, yaitu dilihat dari nilai AMH yang hampir mencapai seratus persen, kemudian semakin turunnya tingkat pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan yang termasuk kedalam kategori sedang, tidak menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian yang dari tiga tahun

terakhir menempati jumlah kejahatan paling banyak. Tindak kejahatan pencurian mengindikasikan adanya ketidaksejahteraan kehidupan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan prasarvey yang peneliti lakukan ke Kepolisian Daerah (Polda) DIY, bahwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku sebagian besar didasari oleh kebutuhan ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriminalitas

1.1 Definisi Kejahatan atau Kriminalitas

Secara sosiologi kejahatan merupakan segala prilaku manusia yang menimbulkan kerugian materi, psikologis dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejahatan harus diperangi sebagaimana menurut ilmu hukum karena karena kejahatan menyebabkan kerugian (Sosilo dalam Maulana, 2014).

Menurut Kartono dalam Arsono (2014) menyebutkan bahwa kejahatan secara yuridis merupakan prilaku manusia yang menyimpang, merugikan dan bersifat asosiatif. Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun begitu, moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas (Adler, Mueller, dan Laufer dalam Arsono, 2014).

Ilmu ekonomi sendiri memandang kejahatan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya harus ditekan. Ilmu ekonomi menggunakan kerangka yang dimiliki dalam mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya untuk menekan angka kejahatan ke tingkat yang serendah-rendahnya.

Hipotesis Becker (1974) bahwa kejahatan merupakan tindakan rasional dengan memperhitungkan untung rugi yang didapatkan dari melakukan tindakan illegal tersebut. Tidak jauh berbeda dengan model yang dijelaskan Becker, rasionalitas kejahatan menurut Sullivan (2003) yaitu ada tiga alasan seseorang melakukan kejahatan, pertama karena ia sangat pandai sehingga sulit untuk tertangkap sedangkan keuntungan yang didapat sangat menguntungkan. Kedua karena opportunity cost yang didapatkan sangat rendah sehingga melakukan kejahatan lebih menguntungkan. Ketiga karena pelaku tidak memiliki rasa hormat terhadap norma yang berlaku sehingga menganggap kejahatan merupakan tindakan yang legal.

1.2 Penawaran dan Permintaan Kejahatan

Menurut Becsi (1999) keseimbangan kejahatan terbentuk dari penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan diperoleh dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sedangkan dari sisi permintaan didapat dari permintaan masyarakat akan keamanan. Permintaan keamanan dilakukan dengan cara seperti menyewa penjaga dan sebagainya. Pemerintah dalam keseimbangan kejahatan dapat mempengaruhi kedua sisi baik dari penawaran maupun permintaan.

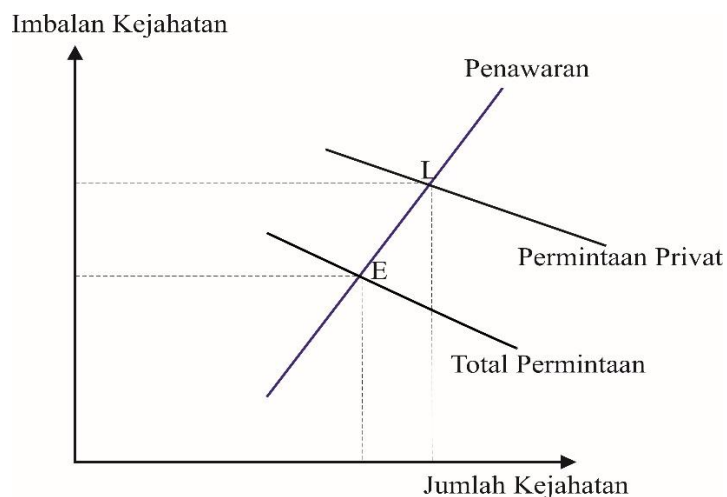
Penawaran kejahatan terjadi akibat pilihan untuk melakukan kegiatan ilegal atau bekerja atau memilih untuk melakukan tindakan ilegal. Pilihan tersebut tergantung dari imbalan kejahatan yang diterima. Imbalan tersebut harus lebih besar dari keseluruhan biaya yang digunakan. Biaya tersebut termasuk hilangnya kesempatan untuk bekerja secara legal, biaya dalam melakukan kejahatan serta ekspektasi hukuman yang akan diterima. Ehrlich (1996) mengungkapkan bahwa faktor-faktor penawaran kejahatan antara lain; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di pasar kerja yang legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan.

Faktor faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran adalah faktor demografi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan perubahan kebijakan pemerjaraan. Pendidikan dan kesejahteraan juga dapat meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan tindak kejahatan dengan menaikkan pendapatan yang legal (Becsi, 1999).

Permintaan kejahatan merupakan permintaan akan keamanan bagi setiap masyarakat yang takut akan terkena tindak kejahatan karena adanya hubungan negatif. Hubungan negatif timbul karena tindak kejahatan akan meningkatkan perlindungan terhadap diri sehingga setiap orang akan menambah biaya untuk mendapatkan perlindungan tersebut sehingga meningkatkan biaya *opportunity* bagi setiap kejahatan.

Komponen lain yang memepengaruhi keseimbangan kejahatan adalah pemerintah. Usaha pemerintah untuk mengurangi jumlah kejahatan bedampak pada kurva permintaan. Permintaan publik terhadap kejahatan (perlindungan kejahatan) memiliki slope negatif, karena permintaan kejahatan tinggi maka biaya *opportunity* kejahatan akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah kejahatan yang terjadi.

Gambar 2. 1 *Permintaan dan Penawaran Kejahatan*



Sumber : Becsi, 1999

Keseimbangan kejahatan terjadi pada titik E dimana akibat adanya pergeseran dari titik L. Pengaruh dari luar akan mempengaruhi keseimbangan baik dari sisi

permintaan ataupun penawaran. Pengaruh tersebut ditentukan oleh elastisitas kurva permintaan dan penawaran. Kurva total permintaan adalah penjumlahan dari permintaan privat/individu dan permintaan publik. Kurva permintaan total berada dibawah kurva permintaan privat dikarenakan kombinasi dari usaha publik dan privat dalam mencegah tindak kejahatan.

1.3 Pengertian Tindak Kejahatan Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut Poerwardarminta dalam Ramadani (2012):

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pencurian di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan yang masuk dalam tindak pidana pencurian yang dilaporkan kepada polisi.

2. Pendidikan

Menurut Todaro (2004) bahwa permintaan akan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi siswa itu sendiri maupun keluarganya serta biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/ keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditemukan oleh proses politik, yang seringnya tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi.

Proses pendidikan akan melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca-tulis penduduk adalah angka melek huruf. Angka melek huruf dihitung dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berusia 15 tahun. (BPS Prov. DIY)

Melek huruf memungkinkan manusia melakukan lompatan kuantum dalam kehidupan peradaban karena dengan melek huruf masyarakat memiliki daya akses yang luas terhadap informasi. Lompatan itu dapat dilakukan karena sumber informasi merupakan sumber kekuatan. Angka melek huruf dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AMH_{15}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

MH_{15+}^t : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis pada tahun ke t

P_{15+}^t : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun ke t

Angka melek huruf bernilai antara 0-100, dimana angka yang tinggi atau mendekati 100 berarti menunjukkan adanya pendidikan dasar yang baik atau program keaksaraan yang bisa diperoleh oleh masyarakat sehingga memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari.

Melek huruf dianggap penting karena merupakan awal dari pembelajaran yang berkelanjutan dari seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya dengan memanfaatkan informasi yang diterimanya. Informasi tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan yang diperlukan sehingga seseorang dapat menggali potensinya.

Menurut Amalia dalam Arsono (2014) pada dasarnya pendidikan merupakan hal pokok yang paling penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat memiliki keterampilan yang baik sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kejahatan

Penelitian yang dilakukan oleh Lochner (2007) ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang legal. Pendidikan yang tinggi pula cenderung akan berpengaruh pada tindak kriminal karena manfaat yang kecil, sehingga kenaikan upah dapat mempengaruhi jumlah tindak kriminal yang ada.

Lochner (2007) berpendapat juga bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung akan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang dimiliki lulusan SD akan berbeda dengan lulusan SMP, SMA dan juga tingkat universitas. Waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD, SMP, SMA dan

universitas akan berbeda. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka waktu luang yang dimiliki akan semakin banyak. Ketersediaan waktu luang yang berlebih dapat memicu timbulnya tindak kejahatan.

Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich (1996) yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, karena dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan memperhitungkan resiko apabila melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan alasan tersebut pendidikan akan mampu menekan angka tindak kejahatan.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankew, 2007). Pengangguran menurut Sukirno (2001) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Kenaikan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha karena tingginya permintaan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tingginya pendapatan nasional, semakin banyak pula tenaga kerja dalam perekonomian. Faktor lain yang menimbulkan (i) pengangguran antara lain karena penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, (iii) ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Sukirno, 2001) :

a. Pengangguran friksional atau pengangguran normal

Ketika perekonomian terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang pesat maka jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya perekonomian akan mampu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yakni di bawah 4% dan pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan mendapat pekerjaan, tetapi sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.

Apabila perekonomian semakin membaik dan tingkat pengangguran semakin rendah, maka para pengusaha tentunya akan semakin kesulitan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja guna meningkatkan produksi mereka. Keadaan seperti ini akan memicu para pekerja untuk menuntut gaji mereka. Selain itu, akan didapati pula keadaan dimana segolongan tenaga kerja mulai meninggalkan pekerjaan lama mereka dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja tersebut mereka tentu akan menganggur sementara, dan sifat menganggur ini tidak serius.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian dan kegiatan perekonomian sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya pengangguran struktural yaitu, (i) akibat dari kemerosotan permintaan, dan (ii) sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi.

Pengangguran yang diakibatkan oleh faktor ke dua atau karena kemajuan teknologi yang digunakan pengusaha akan menimbulkan pengangguran teknologi.

c. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang timbul oleh perubahan-perubahan kegiatan perekonomian. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka pengusaha akan mengurangi penggunaan mesin produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang terus bertambah sebagai akibat dari pertambahan penduduk dengan tidak diikuti perkembangan perekonomian yang semakin membaik, maka pengangguran konjungtur akan bertambah serius.

Untuk mengatasi pengangguran ini bukan hanya menunggu perkembangan perekonomian yang membaik tetapi juga dengan menyediakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja. Pengangguran konjungtur hanya dapat diatasi masalahnya apabila pertumbuhan ekonomi yang berlaku setelah kemunduran ekonomi adalah cukup teguh dan dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari pertambahan tenaga kerja yang berlaku.

Pengangguran juga menimbulkan akibat buruk dan dibedakan menjadi dua aspek :

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tujuan setiap negara adalah memaksimumkan kemakmuran masyarakatnya dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang teguh. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat kita lihat akibat-akibat buruk yang ditimbulkan pengangguran terhadap kegiatan perekonomian.

Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.

Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang rendah juga akan menimbulkan dampak terhadap pendapatan pajak pemerintah yang juga ikut rendah. Dengan demikian pengangguran akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pengangguran menimbulkan dampak yang buruk terhadap sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga buruh akan diikuti oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan perusahaan akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Menurunnya keuntungan akan mengurangi keinginan pengusaha untuk berinvestasi. Dan kedua hal tersebut tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

b. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Beberapa keburukan yang ditimbulkan oleh pengangguran terhadap individu dan masyarakat di sekitarnya antara lain : pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Berbeda dengan negara maju, dimana para pengangguran di sana tetap diberikan asuransi untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan di negara berkembang, mereka harus membiayai kehidupan selanjutnya dan bergantung pada tabungan masa lalu atau pinjaman.

Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Karena keterampilan akan tetap hidup bila terus dipraktikkan atau digunakan. Sehingga

pengangguran dalam periode yang sangat lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja semakin merosot.

Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan perekonomian yang lesu dan pengangguran yang tinggi akan mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah, dan adakalanya akan diikuti oleh demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) juga akan meningkat.

3.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan

Levitt dalam Arsono (2014) mendapatkan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kejahatan property termasuk kejahatan pencurian bahkan setelah ia masukan variabel *dummy* ke dalam analisisnya. Ia juga meneukan adanya hubungan negatif antara kejahatan kekerasan dengan pengangguran. Dengan menggunakan *time series data state*, ia menemukan pengaruh signifikan antara pengangguran dan kejahatan properti untuk untuk kategori remaja ataupun dewasa, tetapi mendapati hubungan yang tidak signifikan antara pengangguran dan kejahatan kekerasan.

4. Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004). Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz.

Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas Kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara Matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

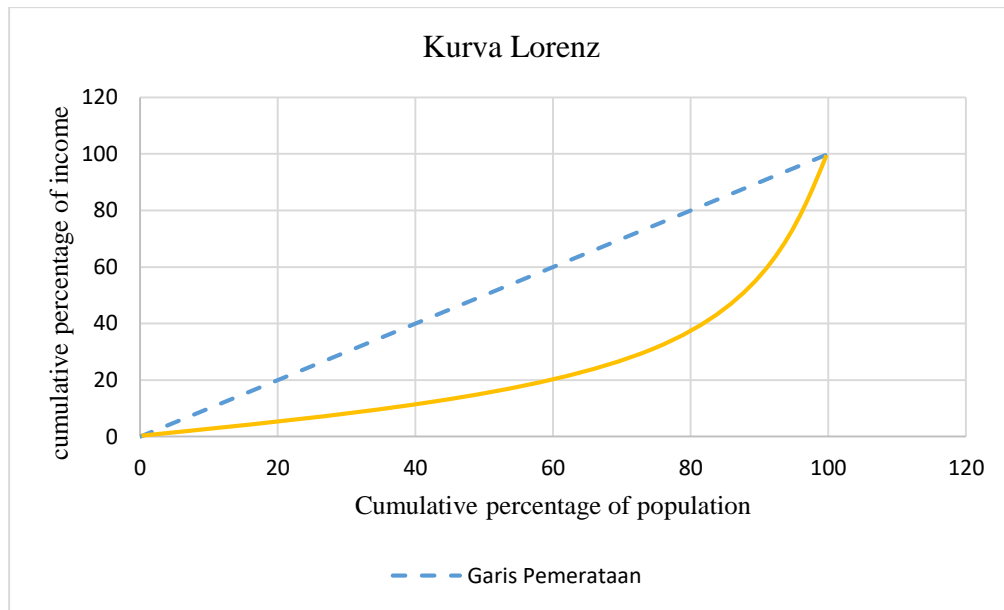
Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Penghitungan dengan menggunakan indeks gini memiliki rasio antara 0 dan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan yang sempurna

merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Gambar 2. 2 Kurva Lorenz



Sumber : Todaro, 2006

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif dan diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz di tahun 1905 (Setiawan, 2011). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sisi vertikalnya menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi horisontalnya menggambarkan persentase kumulatif populasi.

4.1 Pengaruh Kesenjangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kejahatan

Teori Becker menjelaskan bahwa tingkat kesenjangan antara orang dengan pendapatan rendah dari sector legal dibandingkan dengan orang yang ber harta tinggi dalam suatu daerah. Hal tersebut akan mengakibatkan aksi kejahatan akan naik di daerah tersebut akibat adanya *return* dari aksi kejahatan. Sedangkan teori Strain berpendapat bahwa perasaan frustrasi akan menghinggapi orang-orang yang tidak sukses ketika berhadapan dengan orang-orang sukses di sekitarnya. Semakin besar kesenjangan, akan semakin besar rasa frustrasi tersebut sehingga akan memperbesar godaan untuk melakukan tingkat kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan rasio gini di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015 sebagai variabel bebas (X). Selain itu peneliti juga menggunakan data tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015 sebagai variabel terikat (Y).

B. Jenis dan Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa *time series* dan *cross section data* atau data panel. Menurut Soeratno dan Arsyad (1993) data sekunder merupakan data yang disajikan dan atau dipakai oleh lembaga atau badan yang bukan pengolahnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I. Yogyakarta dan Polres dan Polresta serta Polda D.I. Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka terhadap data-data yang dibutuhkan yang diambil dari berbagai literatur dari BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan Polres dan Polresta serta Polda D.I. Yogyakarta.

D. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian menggunakan metode kuantitatif, variabel merupakan dasar dari pembahasan. Menurut Martono (2011) variabel merupakan unsur yang memiliki lebih dari satu nilai atau merupakan suatu unsur yang bervariasi. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan rasio gini sebagai variabel bebas (independen) serta tingkat kejahatan pencurian sebagai variabel terikat (dependen).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat definisi variabel penelitian serta satuan alat ukur yang dipakai dalam variabel penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Martono, 2011). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas dimana jenis kriminalitas yang dijadikan objek penelitian adalah jumlah kejahatan pencurian (PNC) yang dilaporkan yang diambil dari setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satuan jumlah kasus. Kejahatan pencurian adalah jenis kejahatan yang bertujuan untuk merampas atau mengambil hak milik orang lain secara illegal. Macam-macam kejahatan pencurian adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan/biasa, serta pencurian kendaraan bermotor.

b) Variabel Independen

Menurut Martono dalam Arsono (2014) Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan menghasilkan akibat pada variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Variabel Pendidikan (PND)**

Variabel pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas pada lima kabupaten atau kota yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan memakai satuan persen selama periode 2010-2015.

- **Variabel Pengangguran (PNG)**

Variabel pengangguran yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk berusia 15 tahun ke atas yang ada di lima kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan satuan orang atau persen selama periode 2010-2015.

- Variabel Rasio Gini (GINI)

Variabel rasio gini merupakan indeks ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk di lima kabupaten atau kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Suatu indeks pada umumnya tidak memiliki satuan ukuran.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan menggunakan metode analisis regresi data panel. Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Widarjono dalam Basuki dan Yuliadi (2015) menggunakan data panel dalam penelitian mempunyai beberapa keuntungan yaitu. Pertama, data panel yang merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section* mempunyai *degree of freedom* yang lebih besar karena data yang tersedia lebih banyak. Kedua, menggunakan data panel dapat mengatasi masalah yang muncul karena penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Sedangkan menurut Wibisono dalam Basuki dan Yuliadi (2015) keunggulan menggunakan data panel yaitu pertama, mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, mampu mengontrol heterogenitas sehingga data panel dapat membangun model yang lebih kompleks. Ketiga, data panel yang memuat *cross section* yang berulang-ulang (*time series*) sehingga cocok untuk *study of dynamic adjustment*. Keempat, banyaknya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, variatif dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga hasil lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan keenam, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin terjadi karena agregasi individu.

Analisis regresi dalam penelitian ini diolah menggunakan program *Eviews 7.0* dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_1 i_t + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

$$i = 1, 2, \dots N, t = 1, 2, \dots T$$

- Dimana:
- Y= variabel dependen
 - β = koefisien regresi
 - i = *cross-section*
 - t = waktu / *time series*
 - i t = Data Panel
 - ε = *error term*

Model dalam penelitian ini penulis modifikasi disesuaikan dengan ketersediaan data di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga diperoleh persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$PNC_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 PND_{it} + \beta_3 PNG_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (4)$$

dimana,

PNC : jumlah kejahatan pencurian di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2015

PND : angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2015

PNG : penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2015

GINI : ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2015

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan (Basuki dan Yuliadi, 2015).

1. *Common Effect Model*

Merupakan bentuk estimasi paling sederhana karena hanya menggunakan kombinasi data *time series* dan data *cross section* tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu./wilayah Sehingga mengasumsikan perilaku setiap individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode estimasi ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dalam mengestimasi data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan teknik variabel *dummy* untuk melihat perbedaan intersep antar individu/wilayah, namun terdapat kesamaan slop antar wilayah. Teknik ini juga sering disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

3. *Random Effect Model*

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar wilayah. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* masing-masing wilayah. Keuntungan menggunakan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga biasa disebut sebagai *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk menentukan model yang tepat dalam estimasi data panel perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu (Basuki dan Yuliadi, 2015).

1. Uji Chow

Chow test yaitu pengujian untuk mengetahui model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau *Common Effect* (OLS) yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.

F. Uji Kualitas Data

1. Deteksi Multikolinearitas

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multicollinearity*) yaitu tidak adanya hubungan linear antara variabel bebas atau variabel penjelas dalam suatu model regresi. Menurut Frisch dalam Basuki dan Yuliadi (2015) suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas apabila terjadi hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Akibatnya yaitu sulit untuk melihat pengaruh variabel bebas atau penjelas terhadap variabel terikat atau yang dijelaskan (Maddala dalam Basuki dan Yuliadi, 2015).

2. Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas tetap sama dalam sebuah observasi x , dan varian setiap residual sama untuk setiap variabel bebas, sebaliknya apabila terjadi heteroskedastisitas maka nilai variansnya berbeda (Basuki dan Yuliadi, 2015).

Menurut Gujarati dalam Astuti (2014) untuk mendeteksi penyakit heteroskedastisitas salah satunya yaitu dilakukan dengan Uji White. Jika nilai *chi-square* (X^2) yang didapat lebih besar dari *chi-square* kritis maka terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

G. Uji Hipotesis

1. Uji *Goodnes of Fit* (Koefisien Determinasi/ R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model (Basuki dan Yuliadi, 2015). R^2 dirumuskan dengan persamaan :

$$R^2 = ESS/TSS = 1 - (RSS/TSS) \dots\dots\dots (5)$$

$$= 1 - \frac{(\sum e_i^2)}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \dots\dots\dots (6)$$

Sifat-sifat R^2 menurut Gujarati dalam Arsono (2014) yaitu :

- a. Nilainya tidak pernah negative
- b. Batas-batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 nilainya 1 maka kesesuaian garisnya tepat. Jika nilainya nol maka tidak ada hubungan antara regresi dengan regresor.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa tinggi tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Langkah-langkah uji t menurut Gujarati dalam Arsono (2014) :

- 1) Tentukan hipotesis dalam penelitian
 - a. Uji t variabel tingkat pendidikan (PND)
 $H_0 : \beta_2 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel pendidikan (PND) terhadap variabel dependen kejahatan pencurian (PNC)
 $H_1 : \beta_2 < 0$, diduga ada pengaruh signifikan variabel pendidikan (PND) terhadap variabel kejahatan pencurian (PNC)
 - b. Uji t untuk variabel tingkat pengangguran (PNG)
 $H_0 : \beta_3 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel

pengangguran (PNG) terhadap variabel dependen kejahatan pencurian (PNC)

$H_1 : \beta_3 < 0$, diduga terdapat pengaruh signifikan variabel pengangguran (PNG) terhadap variabel dependen angka kejahatan pencurian (PNC)

c. Uji t untuk variabel rasio gini (GINI)

$H_0 : \beta_4 \geq 0$, diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel rasio gini (GINI) terhadap variabel dependen kejahatan pencurian (PNC)

$H_1 : \beta_4 < 0$, diduga terdapat pengaruh signifikan variabel rasio gini (GINI) terhadap variabel dependen kejahatan pencurian (PNC)

2) Kalkulasi nilai t hitung untuk setiap koefisien dan bandingkan dengan nilai t tabel. Rumus mencari t hitung adalah :

$$t = \beta_i / Se$$

dimana β_i merupakan koefisien regresi ke i dan Se adalah standar error koefisien regresi.

a. Jika $|t_{obs}| > t_{\alpha/2; (n-k)}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas.

b. Jika $|t_{obs}| < t_{\alpha/2; (n-k)}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian uji F dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1) Tentukan hipotesisnya terlebih dahulu

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, variabel independen secara bersama sama diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, variabel independen secara bersama sama diduga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2) Cari F hitung dan bandingkan dengan F tabel, rumus untuk menghitung adalah sebagai berikut ;

$$F = \frac{R^2(k-2)}{(1-R^2)(n-k+1)} \dots \dots \dots (7)$$

dimana : R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel

a. Jika $F_{obs} > F_{tabel (\alpha; k-1, n-k)}$ atau signifikansi F kurang dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{obs} > F_{tabel (\alpha; k-1, n-k)}$ atau signifikansi F kurang dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Dalam penelitian ini pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Gujarati, 2004)

Tabel 5. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Probabilitas
C	0,890465	0,6241
PND?	-0,006117	0,7472
PNG?	-0,047079	0,1035
GINI?	0,087236	0,8347

Sumber : Lampiran

Dari data dapat dilihat bahwa nilai probabilitas tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan rasio gini masing-masing adalah 0,7472, 0,1035, 0,8347 $>$ 0,05 sehingga terbebas dari adanya heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya masalah multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien kolerasi yang lebih besar dari 0,8.

Tabel 5. 2 Hasil Uji Multikolinieritas

	Pengangguran	Pendidikan	Rasio Gini
Pengangguran	1,000000	0,689946	0,262627
Pendidikan	0,689946	1,000000	0,435219
Rasio Gini	0,262627	0,435219	1,000000

Sumber : Lampiran

B. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

1. Uji Chow (Uji Likelihood)

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji Chow adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 3 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistik	d.f	Probabilitas
Cross-section F	13,020299	(4,22)	0,0000
Cross-section Chi-square	36,423579	4	0,0000

Sumber : Lampiran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Cross Section Chi-Square* yaitu masing-masing bernilai sama 0.0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Maka berdasar pada uji Chow, model pengujian data panel yang terbaik adalah dengan menggunakan model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji Hausman adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Probabilitas
Cross-section random	15,350281	3	0,0015

Sumber : Lampiran

Berdasar tabel di atas, nilai probabilitas *cross section random* adalah 0.0015 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji Hausman, model yang paling tepat digunakan untuk pengujian data panel adalah dengan *fixed effect model*.

Dari dua uji pemilihan model di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Random Effect* dan *Common Effect*, tanpa peneliti harus melakukan pengujian selanjutnya (LM Tes).

C. Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik yang telah dilakukan sebelumnya, didapat hasil bahwa model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*. Maka peneliti dalam penelitian ini melakukan estimasi dengan metode *Fixed Effect Model* dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(PNC?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 12/24/16 Time: 07:10
 Sample: 2010 2015
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.59387	3.776682	3.864205	0.0008
PND?	-0.086653	0.039515	-2.192935	0.0392
GINI?	-1.870884	0.870957	-2.148078	0.0430
PNG?	-0.025958	0.058435	-0.444220	0.6612
Fixed Effects				
(Cross)				
_KJ--C	1.505303			
_SLM--C	1.280026			
_BT--C	-0.060800			
_KP--C	-0.820092			
_GK--C	-1.904437			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.953996	Mean dependent var	5.817577	
Adjusted R-squared	0.939358	S.D. dependent var	0.890048	
S.E. of regression	0.219179	Akaike info criterion	0.025323	
Sum squared resid	1.056869	Schwarz criterion	0.398976	
Log likelihood	7.620149	Hannan-Quinn criter.	0.144858	
F-statistic	65.17404	Durbin-Watson stat	2.275423	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran

Dari tabel di atas dapat dibuat model analisa data panel untuk setiap *cross-section* yaitu kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan persamaan (4), yaitu persamaan umum regresi penelitian ini sebagai berikut :

$$PNC_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 PND_{it} + \beta_3 PNG_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana,

PNC : jumlah kejahatan pencurian

PND : tingkat pendidikan

PNG : jumlah pengangguran

GINI : ketimpangan distribusi pendapatan

dapat diuraikan interpretasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kejahatan di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ditulis dengan model persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PNC KOTA JOGJA} &= 1,505303 + 14,59387 - 0,086653 * \text{PND_KOTAJOGJA} \\ &\quad - 0,025958 * \text{PNG_KOTAJOGJA} \\ &\quad - 1,870884 * \text{GINI_KOTAJOGJA} \\ \text{PNC SLEMAN} &= 1,280026 + 14,59387 - 0,086653 * \text{PND_SLEMAN} \\ &\quad - 0,025958 * \text{PNG_SLEMAN} - 1,870884 * \text{GINI_SLEMAN} \\ \text{PNC BANTUL} &= (-0,060800) + 14,59387 - 0,086653 * \text{PND_BANTUL} \\ &\quad - 0,025958 * \text{PNG_BANTUL} - 1,870884 * \text{GINI_BANTUL} \\ \text{PNC KL.PROGO} &= (-0,820092) + 14,59387 - 0,086653 * \text{PND_K.PROGO} \\ &\quad - 0,025958 * \text{PNG_K.PROGO} - 1,870884 * \text{GINI_K.PROGO} \\ \text{PNC GN.KIDUL} &= (-1,904437) + 14,59387 - 0,086653 * \text{PND_G.KIDUL} \\ &\quad - 0,025958 * \text{PNG_G.KIDUL} - 1,870884 * \text{GINI_G.KIDUL} \end{aligned}$$

D. Interpretasi Hasil Pengujian *Fixed Effect Model*

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2015

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pencurian berdasarkan uji statistik diperoleh hasil bahwa koefisien tingkat pendidikan dari uji statistik menunjukkan nilai -0,086653, hal itu berarti bahwa jika tingkat pendidikan meningkat maka akan menurunkan tingkat pencurian. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pencurian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0392. Hal tersebut berarti bahwa perubahan tingkat pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempengaruhi tingkat pencurian.

2. Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2015

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa nilai koefisien jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar -0,025958, hal ini berarti apabila tingkat pengangguran naik 1 persen maka akan menyebabkan penurunan jumlah tindak kejahatan pencurian sebanyak 0,025958. Tingkat pengangguran memiliki pola hubungan yang negatif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun probabilitas tingkat pengangguran hanya mencapai nilai sebesar 0,6612, maka dapat disimpulkan bahwa dengan taraf nyata 5 persen, jumlah pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pencurian. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran tidak akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada tingkat kejahatan pencurian di D.I. Yogyakarta.

3. Pengaruh Rasio Gini Terhadap Tingkat Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2015

Interpretasi rasio gini kaitannya terhadap tindak pencurian yaitu dengan koefisien rasio gini sebesar -1,870884 maka dapat disimpulkan bahwa apabila rasio gini di Daerah Istimewa Yogyakarta naik 1 persen maka akan mengakibatkan turunnya tingkat pencurian sebesar 1,870884. Hal ini disebabkan karena ada pola hubungan negatif antara rasio gini dengan tingkat pengangguran. Fenomena ini berbeda dengan hipotesis penelitian ini dimana disebutkan bahwa rasio gini akan memiliki pola hubungan positif.

Jika dilihat dari probabilitasnya, rasio gini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pencurian dengan angka probabilitas sebesar 0,0430. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan distribusi pendapatan atau rasio gini akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada tingkat tindak pidana pencurian.

4. Perbandingan Tingkat Pencurian Setiap Kabupaten atau Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Analisis perbandingan tingkat pencurian antar kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil estimasi data panel dengan menggunakan model *fixed effect* diketahui bahwa daerah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap tingkat pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Jogja dan Kabupaten Sleman jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya yaitu Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kota Jogja sebagai ibu kota dan juga menjadi pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai daerah dengan pusat-pusat pendidikan didalamnya serta kedua daerah tersebut juga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi DIY, sehingga keduanya menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan juga para pelaku usaha.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sosial-ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan rasio gini terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015 yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien senilai -0,086653 dan probabilitas signifikan dengan nilai 0,0392. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan naik maka akan menurunkan tingkat kejahatan pencurian. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien tingkat pengangguran yaitu sebesar -0,025958 dengan probabilitas 0,6612, dengan demikian perubahan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan koefisien senilai $-1,870884$ dan probabilitas yang signifikan dengan nilai $0,0430$. Hal ini berarti apabila rasio gini naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kejahatan pencurian sebesar 1,87 kasus. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsono, Yudho Dito, And Hastarini Dwi Atmanti (2014). *Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, Dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Properti Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.
- Astuti, N. W., & Atmanti, H. D. 2014. *Analisis Tingkat Kriminalitas Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010–2012* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Diakses melalui <http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xxii-pencurian> tanggal 16 Mei 2016 pukul 11.00 WIB
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Kota Yogyakarta Dalam Angka*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. *Kabupaten Sleman Dalam Angka*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. *Kabupaten Bantul Dalam Angka*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Diakses melalui <http://yogyakarta.bps.go.id/> pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 20.00 WIB
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Statistik Daerah Kota Yogyakarta*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. *Statistik Daerah Kabupaten Sleman*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. *Statistik Daerah Kabupaten Bantul*. BPS. Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. *Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Rasio Gini*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. *Rasio Gini Kabupaten Bantul*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. *Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Rasio Gini Kota Yogyakarta*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. *Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo*. BPS. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. *Rasio Gini Kabupaten Sleman*. BPS. Yogyakarta.
- Basuki, Agustri dan Imamudin Yuliadi. 2014. *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Statistik Indonesia*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/> pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 08.00 WIB
- Becsi, Z. (1999). *Economics and Crime in the States*. Federal Reserve Bank of Atlanta.
- Becker, Gary 1968. *Cime and Punishmen : An Economics Approach, Journal of Poloitical Economi*.
- Ehrlich, Isaach, 1996. *Crime, Punishmen and Market for Offense. The Journal of Ekonomik Perspective, Vol. 10 No. 1*
- Hakim, Rizki A. 2009. *Analisis Determinasi Tingkat Kejahatan Properti di Jawa Tahun 2007*. FE UI. Depok.
- Hardianto, Florentinus Nugroho. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi*". Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Unpas, Vol. 13, No. 2:28-41.
- Lochner, Lance. 2007. *Education and Crime*. University of Westerb Ontario
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Macroeconomi : Edisi Keenam*. Erlangga : Jakarta.
- Maulana, Tresna. 2014. *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan*

Pendekatan Ekonomi. Studi Kasus: Narapidana Di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Semarang.

Noviana, Devi N. 2014. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Semarang.

Oliver '02, Alison. 2002. *The Economics of Crime: An Analysis of Crime Rates in America.* The Park Place Economist: Vol. 10

O'Sullivan, Arthur. 2012. *Urban Economics : Eighth Edition.* Department of Economics, Lewis & Clark College. USA.

Setiawan dan Dona. 2015. *Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Jawa Timur dengan Analisis Regresi Spasial.* Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 4, No.1. Surabaya.

Sukirno, Sadono. 2001. *Mikroekonomi Teori Pengantar.* RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith Alih Bahasa. *Pembangunan Ekonomi.* (2016).